

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era reformasi, setelah Presiden Suharto beserta rezim orde barunya diruntuhkan, konfigurasi politik di Indonesia menjadi berubah total. Mulai dari aliran-aliran politik yang termanifestasikan dalam partai politik yang semakin bervariasi, hingga penataan lembaga negara dan visi-visi Indonesia yang dijalankan dengan cara yang lebih demokratis. Proses politik yang ada tidak serta merta terjadi, namun banyak faktor yang mempengaruhi sehingga era baru atas sistem politik Indonesia mengalami transformasi yang dikehendaki oleh para elit politik mayoritas serta masyarakat Indonesia pada saat itu. Jika ditinjau dari sudut pandang kenegaraan, sebenarnya terdapat sesuatu yang tidak tergantikan dari masa ke masa dalam pemerintahan Indonesia, artinya ada nilai-nilai yang disampaikan dan dipegang teguh oleh pemerintah dan terlepas dari transformasi politik dari era orde baru yang bersifat otoritarian ke era reformasi yang demokratis—dan itu adalah Pancasila. Pancasila selama ini menjadi ideologi nasional bangsa Indonesia yang rupanya sangat memiliki ikatan sosial-historis dengan terbentuknya NKRI (Warsito, 2012).

Dalam disertasinya, Pranarka (1985) menyampaikan bahwa terdapat tiga (3) kapasitas pada Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya di dalamnya terdapat akulturasi nilai-nilai keindonesiaan yang telah dijaga ribuan tahun lamanya. Kedua, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang kemudian dijadikan rujukan guna merancang aturan-aturan hukum dalam sumber hukum tertinggi Indonesia, yakni Undang-undang dasar 1945. Ketiga, Pancasila disebut sebagai ideologi nasional yang bersumber dari kesepakatan bersama dibawakan dan diterapkan dari awal kemerdekaan hingga era sekarang, artinya, nilai-nilai yang ada dari pancasila telah menjadi suatu keniscayaan bagi warga negara Indonesia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman hidup

berbangsa dan bernegara. Sebagai satu-satunya ideologi nasional yang bertahan hingga saat ini, Pancasila memiliki sifat keterbukaan yang selalu beriringan dengan budaya-budaya masyarakat Indonesia, dan kemudian Pancasila juga dinamis sebab kajian mengenai Pancasila selalu berjalan mengikuti perkembangan zaman.

Franz Magnis Suseno (1995) menyatakan jika Pancasila adalah ideologi terbuka yang lantas memiliki landasan, isi, dan nilai-nilai yang tidak langsung bisa dioperasionalkan. Menurutnya, penerjemahan dari isi Pancasila tersebut dapat diolah, dikaji, serta digali kembali falsafahnya sesuai kehendak era yang berkembang. Maka, berangkat dari inilah penulis meyakini bahwa Penerjemahaan dan pemaknaan rezim atas operasional dari ideologi Pancasila tentunya berbeda-beda. Perbedaannya terletak pada tafsir atas pancasila sendiri yang diterapkan di berbagai arah dan fokus, semisal Presiden Sukarno yang menyampaikan bahwa Pancasila adalah jalan untuk melibas imperialisme dan kolonialisme yang masih tersisa di bumi Indonesia, selain itu, Pancasila sebagai landasan bagi seluruh rakyat untuk melaksanakan *nation building*, dengan tujuan trisakti; ekonomi yang berdikari, politik yang berdaulat, dan berkepribadian dalam budaya. Sukarno juga berupaya menautkan 3 aliran ideologi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok politik pasca kemerdekaan yaitu sosialisme/komunisme, islamisme, dan nasionalisme—dengan membentuk Nasakom yang dianggap ketiga kekuatan tersebut mampu bersatu melawan imperialisme yang tersisa (Tirto Id, 2019). Lain halnya dengan pemikiran Presiden Suharto atas Pancasila yang lebih menekankan slogan pembangunan dengan penyeragaman, yang termaktub dalam asas tunggal Pancasila—yang mulanya sebagai kepentingan politik untuk ‘mengkondisikan’ partai-partai islam selain Golkar agar tidak muncul radikalisme dalam partai politik, juga untuk kepentingan indoktrinasi ideologi negara secara massal—Pancasila sesuai tafsiran Orde Baru (Tirto.id, 2017).

Fenomena politik-ideologis tentang Pancasila menarik untuk dibahas dewasa ini, terutama mengenai transformasi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ariel Heryanto (2020) dalam *Kompas* 8/08/2020 mengemukakan jika awalnya Pancasila bermaksud menjadi dasar negara Indoensia yang adil untuk merangkul sejumlah ideologi progresif. Namun, sejak Sukarno tumbang dari kursi kepresidenan, Pancasila kerap dipertentangkan dan dibenturkan dengan berbagai ideologi besar di dunia. Hal tersebut dikuatkan dengan argumentasi bahwa Pancasila yang memiliki sejarah dan

kontribusi dalam persatuan bangsa telah memikat dua ideologi besar yang mengandalkan kesejahteraan kolektif—yang satu berdasarkan materialisme, yang satunya lagi berlandaskan iman kepada Tuhan. Kedua ideologi besar itu disebut kiri dan kanan, yaitu Sosialisme dan Islamisme. Keduanya juga memiliki sejarah yang panjang di bumi Indonesia, tapi saat ini, keduanya dipertentangkan dengan Pancasila.

Pertentangan itu semakin menguat di era pasca-Orde baru, yang dikemukakan oleh As'ad Said Ali (2012) bahwa di era awal Suharto tersingkir, telah terjadi liberalisasi politik, yang jika ditinjau dari perspektif orientasi ideologi kelompok gerakan, terdapat 5 jenis tipologi ideologi yang ada. 1 berasal dari pemikiran islam, dan 4 lainnya berasal dari filsafat dunia barat. Pemetaannya terdiri dari kiri-radikal, kiri-moderat, kanan-konservatif, kanan-liberal, dan islamisme. Ideologi kiri-radikal muncul atas keresahanya serta ketidaksetujuan kelompok terkait terhadap sistem demokrasi yang ada. Sebab demokrasi pada praktiknya justru menguntungkan kelompok-kelompok kapitalis yang selanjutnya bertanggung jawab atas menjamurnya oligark-oligark di dalam sistem politik Indonesia. kelompok ini bertujuan memulihkan kesetaraan ekonomi dan perjuangan kelas pekerja, dengan membangun kekuatan-kekuatan tersebut untuk membangun demokrasi yang partisipatif. Salah satu kelompok ini adalah Front Perjuangan Rakyat. Berbeda dengan ideologi kiri radikal, ideologi Kiri-radikal, ideologi kiri-moderat lebih menekankan sistem demokrasi berbasis sosial-ekonomi yang dikombinasikan. Sebutan populer dari ideologi ini adalah sosial demokratik, atau gerakan sosial baru. Pada praktiknya di dunia barat, sosdem disebut jalan ketiga yang mengkehendaki terciptanya negara *welfarestate*, yakni negara dengan konsep kesejahteraan masyarakat. Kelompok ini biasanya tumbuh di kalangan-kalangan mahasiswa maupun kelas menengah yang ada di masyarakat. Sedangkan ideologi kanan, yang diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu kanan-konservatif dan kanan-liberal. Istilah ini mengarah terhadap sikap kelompok penganut ideologi ini yang mana keduanya yang satu (konservatif) lebih memihak terhadap sistem demokrasi yang ada sehingga tetap memilih berjalan lurus dan tidak jarang terlibat di dalamnya, yang satu lagi (liberalisme) berorientasi kepada sistem kapitalisme dan filsafat liberalisme ala dunia barat. Berbeda lagi dengan keempat ideologi barat yang disampaikan, islamisme merupakan ideologi yang terbesar yang berkembang pada saat era reformasi. As'ad Said (2012) mengungkapkan bahwa

pembagian islamisme dikategorikan lagi menjadi dua bagian, yaitu islam *mainstream* dan *non-mainstream*. Kategori yang kedua, jika dilihat dari orientasi sikapnya, sangat berbeda dengan aliran pertama yang moderat atau kebalikan dari sifat itu yang artinya cenderung kaku dan indoktriner.

Fenomena berkembangnya ideologi-ideologi besar tersebut tentu berdampak langsung terhadap diskursus mengenai Pancasila yang akhirnya cenderung melemah, dan seakan-akan legitimasi pancasila sebagai ideologi negara di mata masyarakat sangat rendah (Rachman, dkk. 2012). Dinamika yang terjadi diyakini muncul akibat cara, metode, serta penyampaian Pancasila di era orde baru yang cenderung indoktrinatif—seolah-olah masyarakat harus memahami, menghayati, serta bertindak-tanduk sesuai dengan Pancasila tidak berdasarkan dengan keinginan serta kesadarannya semata, namun bersumber dari perintah negara yang harus dipatuhi. Efek dominonya, di era reformasi, tentunya, di kalangan masyarakat berbagai kelas khususnya kalangan muda, ada ketakutan, fobia, bahkan sinisme terhadap Pancasila yang seharusnya menjadi kebanggaan karena keistimewaannya, namun kini berbalik dicurigai sebagai alat pemertahan kekuasaan saja. Salah satu penyebab Pancasila khususnya dalam konteks setelah tidak menjadi asas tunggal lagi, yang popularitasnya menurun dan seolah kurang dilirik. adalah menguatnya wacana lain yang populer di masyarakat awal tahun 2000-an, yakni wacana agama. Menurut Rachman (2012) dalam *Jurnal pemikiran sosiologi volume 1* dengan topik *Wacana pancasila Dalam Era Reformasi*, getaran nilai-nilai Pancasila yang berbentuk kasat mata seperti tidak adanya topik-topik mengenai Pancasila yang ditemukan pada diskusi ataupun seminar yang diselenggarakan. Bahkan pada kalangan pemerintah, jarang sekali yang menjadikan Pancasila sebagai konsideran dalam produk Perda, atau pada kalangan muda, juga sangat banyak yang terpantau tidak hafal Pancasila. Permisalan lain ada di dunia pendidikan. Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran dan dihapus, kemudian hanya menjadi sub pokok dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Akibatnya, Pancasila tidak lagi menjadi hal yang diminati dan justru agama-lah yang menjadi wacana paling populer. Pendapat ini dibuktikan dengan adanya Survey Gerakan Nasionalis 2006/GMPI tentang way of life mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia (UI, IPB, UNPAD, UGM, UNAIR, UNIBRAW, ITB, UNHAS, UNAND, UNSRI, dan UNSIAH) ditunjukkan kecenderungan mahasiswa menjadikan syariah sebagai

way of life mereka. Data yang diperoleh menunjukkan, 80% memilih syariah, 15 % nasionalis, dan hanya 5 % memilih Pancasila sebagai way of life mereka (Kompas 4 Maret 2008 dalam Rachman, 2012). Maka, semua ini adalah ironi yang terjadi di negara Pancasila seperti Indonesia.

Hal ini menjelaskan bahwa posisi Pancasila mengalami pergeseran, yakni pertama, bahwa Pancasila dihadapkan dengan lawan-lawan yang memiliki karakteristik ideologi yang tidak moderat atau cenderung ekstrem, dengan kata lain bertolak belakang dengan orientasi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Posisi Pancasila sebagai ideologi negara tentunya harus tetap dijadikan pilihan utama di samping berkembangnya ideologi-ideologi yang lain. Namun fenomena yang terjadi belakangan ini seakan berbicara bahwa Pancasila hanya ditempatkan dalam konteks negosiasi serta persaingan atau kontestasi politik saja. Ideologi *non-mainstream* yang sedang berkembang inilah yang harusnya dijadikan perhatian bersama. Misalnya dalam permasalahan-permasalahan yang muncul pada era setelah orde baru, sangat banyak yang melibatkan ideologi-ideologi terkait. Lantas, bagaimana kelanjutan masyarakat serta lebih tepatnya lagi negara dalam merespon hal ini? Sebab permasalahan atas eksistensi Pancasila ini—yang dinilai dapat mengancam keutuhan bangsa dengan tergesernya oleh ideologi lain justru harus ditanggapi secara serius oleh kalangan praktisi maupun akademisi dengan kajian-kajian intelektual yang lebih banyak secara kuantitas dan lebih baik secara kualitas. Bersamaan dengan itu, muncul wacana lain bahwa Pancasila hanya merupakan suatu kontrak sosial, yang sewaktu-waktu dapat tidak disepakati lagi, dan dengan demikian Pancasila dianggap bukan lagi ideologi negara seperti yang diungkapkan oleh Onghokham, Armahedy Mahzar dan Garin Nugroho (Abdullah, 2010: 23). Fenomena di atas tentunya menambah kerumitan serta kompleksnya pewacanaan Pancasila. Ditinjau dari beberapa media seperti *Kompas*, *Tempo.co*, *Republika*, dan *Detik.com*, pasang-surutnya Pancasila memang benar-benar terjadi, namun ada beberapa konteks waktu yang menyebabkan diskursus soal Pancasila kembali dominan di ruang publik.

Wacana tentang pertentangan ideologi sudah terjadi era Presiden Abdurrahman Wahid atau dengan nama populernya Gusdur. Memiliki karakter intelektual yang menonjol, Gusdur merespon isu-isu tersebut dengan mengangkat kembali pemikiran islam moderat dan menempatkan Pancasila untuk turut serta ikut dalam upaya

rekonsiliasi tersebut melalui pers dan tulisan-tulisan karyanya. Atau munculnya aksi terorisme—pada peristiwa Bom Bali tahun 2002 dan 2005 beserta serangkaian peristiwa lain yang terjadi di tahun-tahun selanjutnya yang kembali menjadi stimulus atas kebangkitan wacana Pancasila. Sedangkan wacana liberalisme model baru atau biasa disebut neolib, muncul pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan ekonomi kerakyatan berbentuk BLT, PNPM, dan KUR, namun di lain sisi juga banyak kritik yang menyerang terkait neoliberalisme yang tumbuh subur pada eranya, yakni dengan fenomena naiknya harga BBM, atau dengan dipilihnya mantan gubernur BI, Boediono. Namun oleh Presiden dengan nama populer SBY tersebut justru berkali-kali ditangkal, dengan mengatakan bahwa Neoliberalisme dan kapitalisme adalah suatu keburukan sistem. Berbeda dengan radikalisme Islam dan neoliberalisme, ideologi komunisme yang dulu pernah dianut oleh salah satu partai politik di Indonesia, PKI, pada awal tahun 2014 menjadi wacana yang cenderung tampak di ranah politis, salah satunya pada fenomena menjelang pemilihan Presiden tahun 2014, yang nyatanya sempat membuat panik masyarakat, padahal isu komunisme tersebut muncul untuk kepentingan meraup suara dari salah satu pasangan calon. Dari isu-isu yang sedang berkembang itulah Pancasila digunakan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan pelik yang dianggap berkembang dari satu ideologi tertentu, sehingga munculah stigma anti-Pancasila.

Tipologi ‘Anti-Pancasila’ pertama kali dilacak keberdannya pada teks *petisi 50* yang muncul di era orde baru. Teks tersebut berisi tentang kritik kepada Presiden Suharto yang pada masa-masa itu memakai personifikasi dirinya sebagai Pancasilais, dan siapa yang menentangnya, maka mereka akan dianggap tidak Pancasilais. Haryatmoko (2016) menuliskan bahwa stigma ‘Anti-Pancasila’ pada saat itu merupakan problematika ideologis dan Suharto kerap menggunakan strategi tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya. Terbukti dengan para penandatangan *Petisi 50* yang mana setelah petisi itu terungkap ke publik, Suharto mengintimidasi seluruh penandatangannya dengan pemberangusan hak-hak sosial dan politik.

Di era Presiden Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, adalah era dimana paling banyak wacana-wacana ideologi yang bersinggungan dengan Pancasila dan kemudian disebut dalam terma Ideologi Anti-Pancasila. Salah satu artikel di kanal *Detik.com* menginformasikan bahwa wacana komunisme tersebut muncul berupa tuduhan

terhadap Jokowi yang disebut keturunan PKI. Tak terima dengan itu, Presiden Jokowi membela dirinya dengan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan fitnah yang amat keji. Tuduhan tersebut setidaknya muncul 2 kali pada saat pagelaran Pilpres 2014 dan 2019. Wacana tentang komunisme juga telah kembali pada tahun 2020 pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo dalam fenomena kontroversi RUU HIP. Kontroversi tersebut dimulai saat RUU HIP akan dibahas oleh parlemen setelah dibahas oleh Baleg DPR-RI. Di sanalah sejumlah penolakan dari berbagai ormas keagamaan dan bahkan dari internal DPR-RI fraksi-fraksi tertentu terjadi. Pihak-pihak penolak menyebut bahwa substansi RUU HIP yang memuat konsep ekasila dan trisila merupakan upaya untuk memberikan jalan bagi paham komunis dan PKI untuk kembali hidup di Indonesia. Pemerintah, dalam menanggapi hal tersebut tampil sebagai pemberi solusi dengan mengeluarkan surat penundaan pembahasan RUU HIP. Tak hanya wacana komunisme, namun wacana yang terus diproduksi oleh pemerintah wacana tentang radikalisme islam. wacana ini tumbuh secara massif setelah perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2017. Pada tahun yang sama, Organisasi Masyarakat berbasis Islam bernama HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dibubarkan oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan yang berisi tentang kewenangan pemerintah dalam membubarkan Organisasi yang dinilai tidak sejalan dengan Pancasila tanpa melalui proses hukum. Penerbitan Perppu tersebut membuat khalayak gaduh dan menimbulkan perdebatan di publik. Kedua kasus itu dipandang oleh penulis sebagai fenomena politik untuk mewujudkan hegemoni melalui pewacanaan Ideologi Anti-Pancasila.

Selain dengan menerbitkan Perppu, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah juga mengerahkan banyak upaya untuk menaikkan eksistensi Pancasila dengan membentuk unit kerja ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang kemudian disahkan secara konstitusional dan berubah menjadi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Selain itu, pada 2016, ia menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Penulis berpandangan bahwa hal tersebut merupakan upaya simbolik untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan sekaligus mengaitkannya dengan visi besar pemerintahannya yang dibawakan pada perhelatan Pilpres 2014, yaitu Nawa Cita. Teks Nawa Cita memuat tentang konsep *Trisakti Sukarno* dan berisikan gagasan

instrumental Pancasila dalam poin-poin *Nawa Cita*, misalnya pada poin ke-delapan dan ke-sembilan yang menyatakan tentang revolusi karakter dengan penjunjangan nasionalisme dan penguatan kebhinekaan. *Nawa Cita* berkaitan juga dengan Teks *Revolusi Mental* yang ditulis oleh Joko Widodo pada satu dua bulan sebelum Pilpres 2014—yang berisikan tentang kritik terhadap pemerintahan sebelumnya dan Orde Baru, serta semangat barunya dalam mengubah Indonesia melalui pembangunan yang tak hanya secara institusional, melainkan secara kemanusiaan. Penulis tidak mengambil kanon Pancasila terhadap isu-isu lain seperti kemiskinan, korupsi, malpraktik Pemilu, atau kesetaraan gender karena diskursus Pancasila justru tak nampak ketika dikaitkan dengan permasalahan tersebut. Penulis juga mengafirmasi bahwa Pancasila pada topik tersebut lebih dianggap sebagai solusi atas permasalahan yang bermula dari ideologi, bukan semata-mata dari realitas sosial lain di masyarakat yang bisa dibilang lebih serius. Kendati demikian, di seluruh era yang ada di Indonesia, Pancasila tetaplah merupakan dasar Negara yang tidak pernah tergantikan secara *de jure* maupun *de facto*, dengan kata lain ideologi tersebut menjadi acuan setiap pemerintahan.

Penulis hendak mengkaji wacana ideologi anti-Pancasila yang diproduksi oleh pemerintahan Joko Widodo dengan metode kajian kritis yang bertujuan untuk membongkar makna serta ideologi yang tersembunyi dalam proses hegemoni sekaligus teks yang merepresentasikan praktik-praktik politik. Penulis akan menjelaskan bagaimana salah satu pemerintah era pasca-orde baru tersebut menginterpretasikan Pancasila kepada masyarakat Indonesia dan upaya-upayanya dalam melawan ideologi anti-Pancasila yang disorot oleh media daring Indonesia dalam berita-beritanya—yang penulis kerucutkan menjadi 2 Ideologi, yakni Komunisme dan Islam aliran radikal. Tak hanya itu, penulis akan berupaya membongkar pertarungan ideologi yang terjadi atas diproduksinya wacana Ideologi Anti-Pancasila.

Mengapa harus menggunakan pendekatan kritis? Pertama, pendekatan tersebut yang dapat membongkar secara mendalam apa saja dampak-dampak yang muncul akibat dari interpretasi nilai-nilai Pancasila para pemimpin tersebut dalam rangka mewujudkan hegemoni untuk menghadapi ideologi anti-Pancasila. Di samping penyampaian ideologi dalam upaya hegemoni yang dilakukan oleh negara secara terus

menerus, ada sesuatu tersembunyi yang perlu dipertanyakan sebab bahasa penguasa cenderung manipulatif dalam mewacanakan Pancasila di era Reformasi khususnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 dan periode kedua (2019-Sekarang). Artinya, apakah memang Pancasila ini digunakan sebagai instrumen untuk mengembalikan kondisi seimbang seperti semula atas terjadinya kekacauan politik di Era Orde baru namun dengan Pancasila yang menjadi wacana utama, atau memang negara ingin mendorong masyarakat ke arah perubahan sosial yang lebih baik dengan terciptanya struktur dan sistem sosial politik yang adil namun dengan tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki kekuatan untuk dijadikan pedoman hidup masyarakat Indonesia lewat nilai-nilainya.

Kedua, Studi dan kajian ini berusaha memaparkan secara detail dan berusaha keluar dari prinsip positivistik dan normatif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, sebab penulis merasa bahwa studi normatif atas Pancasila tidak memberikan penjelasan yang akurat atas relasi kuasa dan konteks rezim yang ada, karena ideologi disampaikan secara implisit dengan bahasa-bahasa yang cenderung manipulatif dan sulit dipahami apa maksud sebenarnya dari penutur. Maka, penulis mengajukan satu pendekatan, yaitu kritis. Berangkat dari pendekatan ini, alat analisa sekaligus landasan teoritik yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan di era kontemporer diyakini dapat mengartikulasikan seluruh konstruksi Pancasila oleh pemimpin negara.

Penulis akan melakukan analisis melalui teks pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada hari peringatan kelahiran Pancasila tahun 2017 yang memuat tentang pandangannya tentang Ideologi Anti-Pancasila dan pelbagai wacana pendukung dalam media daring khususnya *Kompas.com* dan *Republika.co.id* yang memiliki muatan serupa—karena dari situlah topik ke-pancasilaan dan wacana ideologi anti-pancasila kemudian dapat ditafsirkan. Kemudian penulis juga akan mengkaji berita-berita yang berisikan wacana ideologi anti-pancasila atau pertentangan antara Pancasila dengan 2 ideologi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila yakni Islam Radikalisme dan Komunisme yang disampaikan oleh pers, dalam bentuk cetak maupun daring. Akhirnya obyek penelitian itulah yang digunakan oleh penulis untuk dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough agar dapat membedah makna secara teks, konteks, serta praksis sosial dalam wacana tersebut.

Metodologi analisis wacana kritis—yang bermula dari pendekatan kritis seperti yang penulis gunakan—menjadi pilihan satu-satunya dalam mengkaji topik tersebut, karena memiliki alasan-alasan yang tegak lurus antara kerangka berfikir yang digunakan dalam metodologi analisis wacana kritis dengan variabel-variabel yang akan dibahas dalam topik. Kemudian analisis wacana kritis yang bermula serta berorientasi terhadap masalah sosial—sangat bersinggungan dengan pendekatan lintas-ilmu semisal ilmu politik—akan lebih tepat jika dihubungkan dengan pembahasan demistifikasi ideologi. Analisis wacana kritis memiliki banyak model, sebab para teoritiknya yang di satu sisi memiliki kesamaan atas landasan berfikir, namun di lain sisi punya perbedaan yang terletak dalam pengembangan konsep.

Wacana-wacana tersebut menurut peneliti banyak ditemui di pelbagai berita yang dimuat pers yakni portal berita daring. Hadirnya Internet menjadi penting karena di era mutakhir ini menjadi konsumsi publik terkait berbagai pemberitaan yang ada di dalamnya. Diketahui sejauh ini bahwa media pers sudah melalui proses konvergensi melalui fasilitas internet dan menjadikan muatan-muatannya lebih bervariasi dengan menghadirkan tidak hanya pesan melalui teks, namun berupa audio visual, maupun video visual. Disebut oleh Jenkins (2004) bahwa media telah melalui proses konvergensi menjadi Media jenis baru (*New Media*) berbentuk media digital karena keterlibatan teknologi, genre, industri dan pasar di dalam perjalanannya yang baru. Di samping itu, Witschge (2004) juga menyampaikan bahwa internet telah mendukung sistem demokrasi secara partisipatif dan komunikatif karena di dalam internet terdapat fasilitas-fasilitas penyedia layanan komunikasi tanpa hambatan yang berarti bagi masyarakat dan dapat diakses dengan semangat sosial untuk memperbaiki percakapan politik dan perwujudan demokrasi deliberatif.

Di Indonesia, internet justru hadir di tengah kemelut permasalahan demokrasi sebelum tahun 1998—krisis ekonomi dan politik mencapai titik kulminasinya—dan menjadi ruang komunikasi sekaligus pembentuk opini publik bagi kelas menengah yang akhirnya dimanfaatkan oleh pers sebagai medium ‘pembangkangan’ terhadap rezim Soeharto (Hill & Sen, 2005). Media daring inisiator yang muncul di Indonesia yang sejauh ini tercatat adalah Detik dan Tempo, yang dibredel pemerintah dan akhirnya dilarang untuk tampil di publik pada tahun 1994. Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 dan dimulainya era baru politik di Indonesia dengan tajuk Reformasi

mengawali konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk elemen Pers, yang ditandai dengan munculnya 66 berita daring dengan domain serta situsnya masing-masing. Nugroho, Putri, dan Laksmi (2011) berhemat bahwa kemunculan situs berita daring yang sangat masif dari tahun 2000-2011 itu merupakan produk kebebasan Pers yang terbentuk melalui sektor politik dan hukum dan selain itu memiliki dampak yang luas terhadap konsumsi berita di internet oleh masyarakat.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (2007) dalam (Firmansyah, 2019) menuliskan setidaknya Internet telah digunakan secara masif oleh 143,26 Juta dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mengakses isu sosial politik secara berturut-turut. Pertama, berita mengenai lingkungan dan sektor sosial mencapai 50,26%, kemudian berita tentang keagamaan sebanyak 41,55% serta yang terakhir adalah akses informasi dalam bidang politik sebesar 36,94%. Maka, tidak heran jika opini publik terbentuk melalui media yang terbaharukan yakni media daring, yang bersarang di dunia maya.

Kembali ke persoalan pewacanaan Ideologi Anti-Pancasila, akhirnya penulis menaruh pilihan media produsen wacana yang mana memuat berita-berita tentang seputar Ideologi Anti-Pancasila kepada 2 media daring besar di Indonesia yakni Kompas.com dan Republika.co.id. Keduanya dipilih oleh penulis berdasarkan preferensi yang bahwa Kompas.com sebagai titisan dan produk transformatif dari salah satu media pemberitaan terbesar di Indonesia, Kompas, dan *Republika.co.id* berdasarkan nuansa ke-Islaman yang tentu berkaitan dengan topik penelitian penulis dan juga posisi media tersebut yang mana posisi politiknya cenderung berseberangan dengan *Kompas.com*. Penulis menelusuri jejak jurnalisme *Kompas.com* yang mana memiliki sikap kritis namun ‘terbatas’, dan justru inilah yang menarik penulis untuk mengkaji berita-berita dari media massa digital ini. Selain itu, pemilik *Kompas.com* juga tidak terlibat dalam politik secara terang-terangan, namun secara tidak terduga, arah pemberitaannya dapat terbaca secara politis. Berbeda dengan *Kompas.com*, *Republika.co.id* dipilih oleh penulis secara khusus karena media tersebut merupakan salah satu—bahkan satu-satunya—media arus utama berbasis Islam yang paling laku dan tetap bertahan di Indonesia hingga saat ini (Keller, 2009). Hal tersebut tentu akan sangat berguna untuk penulis ketika mencoba menghubungkan posisi politik media ini dengan pemberitaan berwacanaan ideologi Anti-Pancasila khususnya sub wacana

radikalisme islam—dan sangat memungkinkan juga pada sub wacana komunisme karena ideologi ini memiliki stigma yang cenderung dipertentangkan dengan ideologi islam dan kelompok-kelompoknya.

Keller (2009) menyatakan bahwa Kompas merupakan media dengan konsumen harian terbanyak di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun dengan mengedepankan gaya pembahasaan dalam berita yang berhati-hati dan seimbang. Begitu keberhati-hatianya dalam penulisan berita, media Kompas mendapatkan kritik dari salah satu Ilmuwan Benedict Anderson yang menyebut Kompas sebagai Koran Orde baru Sejati (Hill, 2009, p.98). Kompas telah memiliki inisiatif untuk menciptakan suatu produk baru dalam sejarahnya berupa portal berita daring dengan situs Kompas.com pada tahun 1998, yang hingga kini juga merupakan salah satu berita dengan pengunjung terbanyak.

Keller (2009) dalam (Firmansyah, 2019:18) menyebutkan bahwa Republika merupakan surat kabar yang dibentuk oleh ICMI pada tahun 1993 untuk menyuarakan kepentingan umat islam dalam konteks perkembangan politik di era itu. Hingga pada tahun 1994, Republika menayangkan versi daring dari portalnya dan menjadikan Republika sebagai pers bernuansa Islam pada masa akhir Orde Baru. Kemudian Keller (2009:83) menambahkan bahwa Republika merupakan salah satu kekuatan politik Orde Baru melalui dukungan serta keberpihakan dari ICMI. Namun, pada era reformasi, kekuatan media Republika terkikis karena sudah tak lagi mendapatkan dukungan dari Orde Baru dan beralih menjadi portal berita bernuansa islam yang mendapatkan banyak sokongan dari pebisnis Islam yang punya banyak pengaruh dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Kedua media pemberitaan tersebut yang khususnya memiliki fitur daring, dilihat oleh penulis secara historis dan prinsipil sebagai media yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi proses pembentukan opini publik. Wacana-wacana yang diproduksi oleh penguasa, bahkan akan dimuat secara berbeda oleh masing-masing pers yang memiliki keberpihakan, nilai-nilai, serta faktor eksternal yang juga berbeda. Bukan hanya faktor ciri khas dalam pemberitaannya, namun dalam skala makro dan keseluruhan, penguatan tentang kedua berita tersebut melakukan pemuatan wacana tentang Ideologi Anti-Pancasila menjadi penting, karena media dan

pers sesungguhnya bukan elemen yang netral—jika dilihat dari perspektif ekonomi politiknya.

I.2 Penelitian Terdahulu

Pada proses menuju perumusan penelitian, tentu akan ada beberapa rujukan dari penelitian terdahulu yang kurang lebih memiliki topik pembahasan yang sama dengan substansi yang berbeda. Penelitian yang akan penulis lakukan ini berangkat dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh Luky Maulana yang berjudul *Diskursus Intoleransi dalam Pilgub Jakarta Tahun 2017 di Media Indonesia (Studi Wacana Kritis pada Kompas.com, Republika.co.id, dan Tempo.co)*. Pada penelitian tersebut, peneliti berusaha mengungkapkan apa saja wacana-wacana yang berkembang dalam konteks Pilgub 2017, yang kemudian berujung ditemukannya 4 sub-wacana atau tematik wacana dari wacana besarnya—wacana Intoleransi. 4 sub-wacana tersebut adalah wacana aksi bela islam, wacana kepemimpinan muslim, wacana pasca-ahok, dan wacana penistaan agama. Objek penelitian yang dipakai oleh peneliti ialah kumpulan berita-berita dari ke-tiga media Indonesia pilihan peneliti yang kemudian dibongkar melalui studi wacana kritis milik Norman Fairclough. Penelitian tersebut menghasilkan temuan data yang begitu detail mengenai diskursus Intoleransi yang terjadi pada Pilgub Jakarta 2017 dan tersebar di berbagai media daring Indonesia.

Meskipun penelitian tersebut merupakan penelitian dalam lingkup Ilmu Komunikasi dan dihasilkan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi, penulis merasa bahwa pembahasan mengenai diskursus juga tidak luput dalam dimensi Ilmu Politik—yakni ketika hegemoni penguasa dioperasikan, jaringan kekuasaan terbentuk melalui proses produksi wacana, ataupun fenomena ekonomi politik media, serta yang terakhir pembentukan ideologi politik oleh Rezim.

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa diskursus Intoleransi dapat dihubungkan dengan fenomena diskursus yang lain—yang penulis maksud sebagai diskursus Ideologi Anti-Pancasila—dan dapat dianalisis dalam konteks yang lebih luas dan juga melibatkan aktor-aktor kekuasaan yang lebih banyak. Maka, penulis memutuskan untuk melakukan analisis secara kritis terhadap wacana Ideologi Anti-

Pancasila yang diproduksi oleh Rezim Joko Widodo dalam konteks sepanjang Kepemimpinannya pada tahun 2014-2019.

Posisi Pancasila dinilai sangat mengkhawatirkan sejak munculnya ideologi-ideologi khususnya aliran radikal yang menyebabkan permasalahan bangsa. Maka, penulis percaya bahwa wacana akan Pancasila harus terus digaungkan, dengan upaya-upaya negara dalam mewujudkan hegemoni. Sejak teori-teori politik post-modernisme semakin banyak dihadirkan dalam materi perkuliahan, maka penulis percaya upaya itu akan sejalan dengan perkembangan atas penelitian dan kajian di Ilmu Politik itu sendiri. Untuk itu, wajar jika penulis menginginkan kelanjutan dari kajian ideologis soal posisi ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dengan pendekatan kritis. Selain itu, atas dasar keresahan yang penulis rasakan agar dapat memberikan alternatif pembahasan studi wacana dan ideologi yang berkembang pada saat ini. Linguistik dan politik yang menurut teori post-modernisme tidak bisa dipisahkan, dan penulis memiliki minat tertentu dalam bidang linguistik.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa konstruksi Pancasila yang diproduksi oleh Pemerintahan Joko Widodo melalui wacana ideologi anti-Pancasila dalam teks pidato 1 Juni 2017?
2. Bagaimana wacana Ideologi anti-Pancasila diartikulasikan oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id* sebagai intertekstualitas atas teks pidato 1 Juni 2017 melalui pemberitaan?
3. Siapa sajakah aktor-aktor yang terlibat dalam pertarungan politik atas pewacanaan ideologi anti-Pancasila?

I.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi Pancasila diartikulasikan oleh Rezim Joko Widodo melalui wacana ideologi anti-Pancasila dalam teks pidato kenegaraan 1 Juni 2017

2. Untuk mengetahui bagaimana *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam mewacanakan ideologi anti-Pancasila sebagai intertekstualitas dari teks pidato 1 Juni 2017 dalam berita-beritanya
3. Untuk memahami konstelasi aktor-aktor yang terlibat dalam pertarungan politik atas pewacanaan ideologi anti-Pancasila

I.5 Manfaat penelitian

1. Secara Praktis, diharapkan pembaca dapat memahami kekuatan relasi kuasa dengan wacana, serta bagaimana pertarungan ideologi di dalam sebuah wacana khususnya Pancasila dengan ideologi-ideologi anti-pancasila. Selain itu, pembaca juga dapat memahami konstelasi aktor beserta kepentingannya dalam pewacanaan ideologi anti-Pancasila
2. Secara Akademis, manfaat yang penulis inginkan adalah membuka selebar-lebarnya '*power of knowledge*' dengan berbagai sudut pandang keilmuan serta kajian ilmiah yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam disiplin Ilmu Politik.
3. Secara Sosial, maka apa yang ada dalam peneitian ini, setidaknya dapat merubah pola pikir 'kaku' masyarakat agar lebih dinamis dan isi dari penelitian yang menampilkan relasi kuasa dengan wacana tidak menjadikan masyarakat apatis terhadap negara demi kemajuan bangsa Indonesia.

I.6 Kerangka Pemikiran

Konsisten dengan metode yang dipakai dalam penelitian ini, yakni Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, maka ada sedikitnya 3 Konsep kunci atas AWK yang perlu dipahami:

1. Ideologi
2. Kekuasaan
3. Kritis

1. Ideologi

Wodak (2009) mengatakan bahwa ideologi yang ia maksud adalah perpektif gambaran umum akan tujuan tentang dunia yang memihak sebab dipengaruhi oleh berbagai representasi keyakinan, opini, mental, serta interpretasi sosial oleh

kelompok-kelompok tertentu. Maka, tak heran jika ideologi melalui sebuah wacana dapat berfungsi untuk menutupi ketidakpercayaan rakyat terhadap penguasa yang tidak mampu mewakili kehendak rakyat. Cara-cara yang ditempuh tak jarang dengan melakukan sensor terhadap apa yang ia sampaikan yakni wacana-wacana khusus yang punya maksud tertentu untuk mengkondisikan ‘pintu masuk’ pada ruang publik.

2. Kekuasaan

Kekuasaan harus dipahami sebagai gambaran perihal relasi-relasi yang asimetris antara aktor satu dengan aktor yang lain dalam arena politik, dengan catatan bahwa posisi tersebut diperhitungkan dengan tidak melepaskan konteks kepemilikan oleh kelompok tertentu. (Wodak & Reisigl. 2009: 89). Landasan berfikir CDA milik Wodak tidak terlepas dari pengaruh Michael Foucault, yang mendefinisikan bahwa kekuasaan tidak berdiri secara tunggal, dan kekuasaan adalah rezim wacana. Sehingga ketika wacana dapat melegitimasi sekaligus mendelegitimasi kekuasaan. Kekuasaan disini disebut sebagai situs perjuangan sosial. Dalam sebuah teks terdapat wacana, atau wacana yang kemudian berbentuk teks, dan dalam sebuah teks tersebut dalam rangka perwujudan hegemoni dan upaya dominasi dapat dilacak dimanakah letak pertarungan ideologi. Wacana tidak terlepas dari bahasa, dan bahasa memiliki makna tertentu, namun bahasa tidak pernah netral. Artinya, sesuai dengan pemikiran post-strukturalis yang lebih condong terhadap ambiguitas daripada kemutlakan dan kebenaran, maka bahasa telah membekukan ideologi yang ada di dalamnya.

3. Kritis

Pemakaian istilah ‘kritis’ tentunya tidak terlepas dari dampak mazhab Frankfurt, yang memahami bahwa kajian mengenai kehidupan sosial harus dikorelasikan terhadap unsur-unsur kebudayaan, termasuk penggunaan kebahasaan atau linguistik punya pengaruh yang besar terhadap perjuangan perlawanan atas dominasi serta ketidakadilan untuk menuju pada kesetaraan. Michael Foucault, secara lebih detail mengungkap bahwa wacana berfungsi sebagai sistem pengetahuan yang menyampaikan informasi tentang teknologi memintah dan teknologi sosial. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa wacana adalah suatu praktik kekuasaan dalam tatanan sosial masyarakat modern. Wodak berpendapat bahwa setidaknya terdapat 3 alasan untuk memahami makna ‘kritis’ itu sendiri yang merupakan bentuk pengambilan jarak terhadap data: pertama, data bersinggungan dengan konteks sosial;

kedua, data dapat menjelaskan dimana posisi politis partisipan atas wacana yang diteliti; ketiga, data menuntut peneliti agar melakukan refleksi secara terus-menerus (Wodak & Reisigl, 2009:8).

I.7 Konseptualisasi

Atas pertimbangan kebutuhan konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, maka penulis juga menambahkan konsep sebagai langkah operasional penelitian, yakni:

1. Konsep Aparatus Ideologi Negara
2. Konsep Kritis
3. Konsep Ideologi
4. Konsep CDA (*Critical Discourses Analytic*)

Berikut penjelasan dari setiap masing-masing konsep:

I.7.1 Konsep Aparatus Ideologi Negara

Louis Althusser, filsuf kenamaan Perancis, yang mana juga seorang marxis, melanjutkan tradisi berfikir kiri di era kontemporer dan memiliki banyak pengaruh terhadap paradigma pasca-marxisme yang cukup kontroversial. Pemikirannya yang terkenal adalah melalui intervensi yang dilakukan dalam ‘konjungtur tertentu’—dari perkembangan sosial-politik yang ada misalnya saat kongres partai komunis Soviet ke-20 (1956) dan perpecahan Soviet dan Cina (1960-1963). Althusser mencoba mengambil jalan alternatif antara dogma-dogma stalinis yang ia sebut telah cukup ‘mencemari’ kemurnian marxisme dan kritik kanan atas dogma tersebut—yang beralasan atas dasar humanisme. Althusser (1997:111) menyebut bahwa ia ingin melampaui 2 di antaranya dengan konsep determinisme pokok terakhir—yang mana melibatkan otonomi relatif terhadap suprastruktur.

Atas dasar tesis Althusser mengenai kekuatan dari ideologi, ia menyebut bahwa kaum marxis klasik cukup lemah dalam pengalamannya mengenai praktik politik yang mereduksi negara menjadi suatu pokok material yang nyata dan absolut. Althusser menunjukkan bahwa gagasan yang dibawa Gramsci cukup menjelaskan bahwa negara—secara terotik—mencakup institusi-institusi yang lain dari pada negara itu sendiri, yakni dari elemen masyarakat sipil. Dari sana lah kemudian Althusser menjelaskan tentang perbedaan antara ISA (*Ideological State Apparatuses*)

dan RSA (Repressive States Apparatuses). Dalam teori Marxis, negar terdiri dari tentara, pemerintahan, kepolisian, pengadilan, penjara, serta lain-lainya yang bersifat represif. Lain halnya dengan ISA yang selain lebih preventif, juga memiliki perbedaan yang jelas pada sifatnya yang lebih privat (Althusser, 2015:24). Daftar empiris dari ISA disebut Althusser dengan pelbagai institusi: ISA Agama, ISA Pendidikan, ISA Keluarga, ISA Hukum, ISA politik, ISA serikat buruh, ISA Budaya dan ISA Komunikasi.

Althusser (2015:25) menganggap bahwa perbedaan antara sifat privat dari ISA dan sifat publik dari RSA tidak begitu penting—karena yang terpenting adalah bagaimana kedua institusi tersebut bekerja sesuai fungsinya. Perbedaan yang mendasar dari keduanya adalah: RSA bekerja dengan represifitas, ISA bekerja dengan ideologi. Namun, persamaan atas keduanya adalah memastikan bahwa suprastuktur dan infrastruktur yang merupakan kepentingan kelas penguasa untuk tetap mempertahankan *status quo*, dapat terjaga dengan kedisiplinan.

I.7.2 Konsep Kritis

Gagasan ‘kritis’ identik dengan ‘mazhab frankfurt’ yang berkembang setelah filsuf kenamaan besar Karl Heinrich Marx meninggal. Konsep dan Teori kritis berawal dari peninjauan kembali atas pemikiran Marx soal revolusi sosial yang akhirnya pada realitasnya tidak menemukan jalan keluar. Marx, yang sangat cenderung mereduksi bahwa ekonomi-lah yang selalu mempengaruhi struktur—yakni politik, sosial, budaya, dan pendidikan—dan melalui perjuangan kelas sosial (baca:proletar) akan menciptakan suatu transformasi sosial dan pengalihan kekuasaan ke tangan kelas proletar. Namun, kegagalan atas ramalan tersebut rupanya terbaca oleh para ilmuwan mazhab frankfurt, dan mereka memberikan alternatif agar beralih menuju pemanfaatan kemampuan suprastruktur, yakni melalui media massa (McQuail, 1987). Mazhab frakfurt mengembangkan Teori kritis sejak generasi pertama, dan kritik tersebut ditujukan kepada modernisme. Setidaknya terdapat 6 garis besar atas isi kritik tersebut, yakni: pertama, kritik tersebut membidas soal paradigma obyektivisme dalam sains, yang menganggap benda hidup sama dengan benda mati, sama-sama dapat diukur secara kuantitatif. Namun ternyata beberapa realitas menggugurkan obyektivisme tersebut; kedua, banyak teori yang nihil dalam praksisnya. Artinya, memang banyak teori-teori yang telah diciptakan, namun belum

dapat mengubah dunia; ketiga, banyak teoritis yang tidak emansipasif, menyampaikan banyak teori, namun tetap mengamini penjajahan; keempat, banyak teori yang tidak mempertimbangkan nilai yang disampaikan, dan akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan yang destruktif; kelima, tidak anti-kemapanan dan lemah terhadap kekuasaan; keenam, melupakan prinsip historikalitas, yakni menjelaskan bahwa tidak ada gagasan-gagasan yang muncul di ruang yang hampa, seluruhnya lahir ketika terdapat konteks yang bersinggungan. Namun banyak filsuf dan teoritis yang gagal memahami ini. Disebut penting karena jika konteks berubah, maka hasil dari gagasan tersebut juga akan berbeda.

Kritis memang dijadikan sebagai tradisi berfikir, namun bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada dalam premis, teori, maupun realitas sosial saja, namun kritis—yang berangkat dari proses budaya dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial—memiliki visi tersendiri, yaitu menjadi tonggak dalam rangka melawan dominasi serta ketidakadilan demi tercapainya kesetaraan. (R. Wiggershaus, 1994). Teori-teori kritis dikembangkan oleh salah satunya ilmuwan mazhab Frankfurt generasi kedua bernama Jurgen Habermas. Habermas, yang seperti pendahulunya, menyebut bahwa kritik yang lahir dari generasi pertama Mazhab Frankfurt belum konsisten, karena mengamini obyektifikasi manusia, meskipun telah mengakui relasi antara subyek dan obyek. Kemudian, generasi pertama Mazhab Frankfurt telah terjebak pada spektrum kritiknya sendiri, yakni menganggap bahwa seluruh manusia modern itu memiliki karakteristik yang sama, padahal mereka telah menyampaikan bahwa manusia pada dasarnya berbeda-beda. Atas dasar asumsi bahwa perlakuan terhadap manusia harus berbeda-beda, maka, untuk melanjutkan penjabaran dari teori kritis, Habermas mulanya melihat tipe-tipe relasi manusia; pertama, relasi antara subyek-obyek; kedua, subyek-subyek; ketiga, subyek-*itself*. Kemudian, Habermas mengklasifikasikan 3 klaster keilmuan dengan tiga dunia; Ilmu empiris-obyektif untuk relasi subyek-obyek—gunanya untuk menciptakan teknologi dan sebagainya untuk keperluan alamiah, Ilmu historis-hermeneutik diterapkan untuk hubungan subyek-*itself*, dan yang terakhir Ilmu Sosial-kritis untuk subyek-subyek, atau kepentingan antar manusia.

Dari premis-premis di atas, Habermas sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Ilmu pengetahuan tidak berdiri dan berjalan secara netral, namun memiliki kepentingan,

sebab di samping Ilmu pengetahuan selalu ada subyek. Habermas pada akhirnya mengkritik manusia modern yang selalu mendewakan rasionalitas—yang dimaksud olehnya rasionalitas instrumental—yang mana rasio tersebut dipakai untuk alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jika cara berfikir rasio-instrumental yang selalu digunakan untuk relas subyek-subyek, maka akan terjadi fenomena sosial saling memeralat, dan menyebabkan ketidakaturan sosial serta kontra-perubahan. Akhirnya, Habermas melanjutkan ide-ide terbaiknya dengan merubah cara berfikir rasio-instrumental dengan rasio-komunikatif, dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang dapat mengerti satu sama lain, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah melalui komunikasi. Disitulah habermas memunculkan satu teori yang hingga kini populer di kalangan akademisi, yakni ruang publik, yang di dalamnya juga terdapat sistem moral yang ia sebut etika dikursus. Selanjtnya, konsep kritis ini berguna untuk menjelaskan bagaimana media massa tidak berdiri secara netral, namun memiliki kepentingan tertentu.

I.7.3 Konsep Ideologi

Istilah ideologi mulai muncul pada tahun-tahun dimana revolusi Perancis sedang menggelora. Adalah Destutt de Tracy, yang mengguakan istilah tersebut untuk menginterpretasikan suatu studi yang berkaitan dengan bagaimana asal mula dari ide-ide, gagasan, serta hakikat dari perkembangan pemikiran manusia, yang kemudian saat ini dikenal di dunia akademik sebagai "*Science of idea*"(Christenson, et.al., 1975:3). Gagasan tersebut dibawakan oleh Tracy dengan tujuan membawakan perubahan-perubahan dengan dasar intelektual terhadap masyarakat Perancis. Namun, penguasa Perancis pada saat itu, Napoleon Bonaparte, menganggapnya sebagai khayalan yang sama sekali tidak mempunyai nilai praktis. Ideologi menurut pemikiran Tracy ini, memiliki makna positif. Menjelang abad 19, ketika napoleon measuki masa-masa krisis dan terjangkit ketakutan atas hilangnya kekuasaanya di Perancis, Ia menganggap seluruh pemikiran dari cendekiawan-cendekiawan soal ide-ide, gagasan, dan segalanya yang berupa hasil analisis adalah omong kosong, tidak bernilai, bahkan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Napoleon secara tegas melarang juga pengajaran Ilmu politik dan Ilmu-ilmu yag mengandung nilai moral di Berbagai Institusi pendidikan. Akhirnya, Ideologi menjadi suatu stigma dan dimaknai secara negatif (Ricoeur, 1986). Tokoh-tokoh lain yang memiliki pandangan negatif

terhadap ideologi adalah Karl Mannheim dan Karl Heinrich Marx. Marx melalui tesisnya menyampaikan bahwa ideologi hanyalah pemikiran kelas borjuis yang berguna untuk menjustifikasi perlakuannya terhadap kelas yang dikuasai dalam satu sistem hukum dalam rangka mempertahankan dominasi serta hak istimewanya sebagai kelas penguasa. Bahkan, Marx menyebut bahwa Ideologi adalah kesadaran palsu atas kenyataan sosial-ekonomi yang menjadi angan-angan bersama kemudian ditanggung oleh kelas sosial yang bersangkutan. Melalui ideologi tersebut, proses kehidupan masyarakat dalam memandang suatu realita dibuat kabur. Berbeda dengan Marx—meski tetap menegaskan ideologi—Mannheim mengklasifikasikan ideologi dalam dua jenis, yaitu ideologi total dan ideologi partikular. Disebut sebagai ideologi total karena menyangkut tentang seluruh pemikiran, gagasan, ide besar pada abad dan kelas tertentu, misalnya kelas sosial. Lalu ideologi total ini, bersinggungan dengan apa yang dinamakan *weltanschauung*, berarti didukung oleh mayoritas struktur sosial yang ada di masyarakat. Kemudian ideologi partikular yang berbeda dengan total memiliki karakteristik lain, yaitu lebih diterima secara personal serta psikologis oleh masyarakat (Mannheim, 1936; Sargent, 1987).

Pemakaian ideologi berkembang seiring berkembangnya waktu, misalnya Gramsci, yang bahkan tidak mengkonotasikan ideologi secara negatif sama sekali, kendati ia adalah pemikir marxian. Gramsci berpendapat bahwa ideologi dapat dipilah menjadi dua, berdasarkan sifatnya, yakni ideologi arbiter dan ideologi organis. Tetap sedikit mengakui adanya kemungkinan atas keberadaan kesadaran palsu, ia menyebut kemungkinan tersebut saat menjelaskan ideologi arbiter dan sebaliknya, tidak ada kemungkinan adanya kesadaran palsu pada ideologi dengan sifat organis. Ideologi organis ini cenderung bersifat netral, tentang bagaimana seluruh konsepsi atas hingar-bingar dunia secara tidak langsung termanifestasikan dalam kesenian, sosial, budaya, ekonomi, dan seluruh praksis individual maupun kolektif (Rahardjo, 1985). Ambil contoh ketika ideologi berkembang dalam konteks rezim fasis di Italia awal abad 20-an. Saat buruh sedang gencar-gencarnya melakukan gerakan untuk menumbangkan kapitalisme, justru seakan-akan tidak berlutik ketika berhadapan dengan pemimpin fasis Benito Mussolini. Agenda persatuan dan anti-asing yang digaungkan oleh negara justru membuat kaum buruh merelakan eksploitasi yang terus-menerus menggempur mereka pada masa itu. Keabsahan fasisme sebagai suatu ideologi kelas penguasa

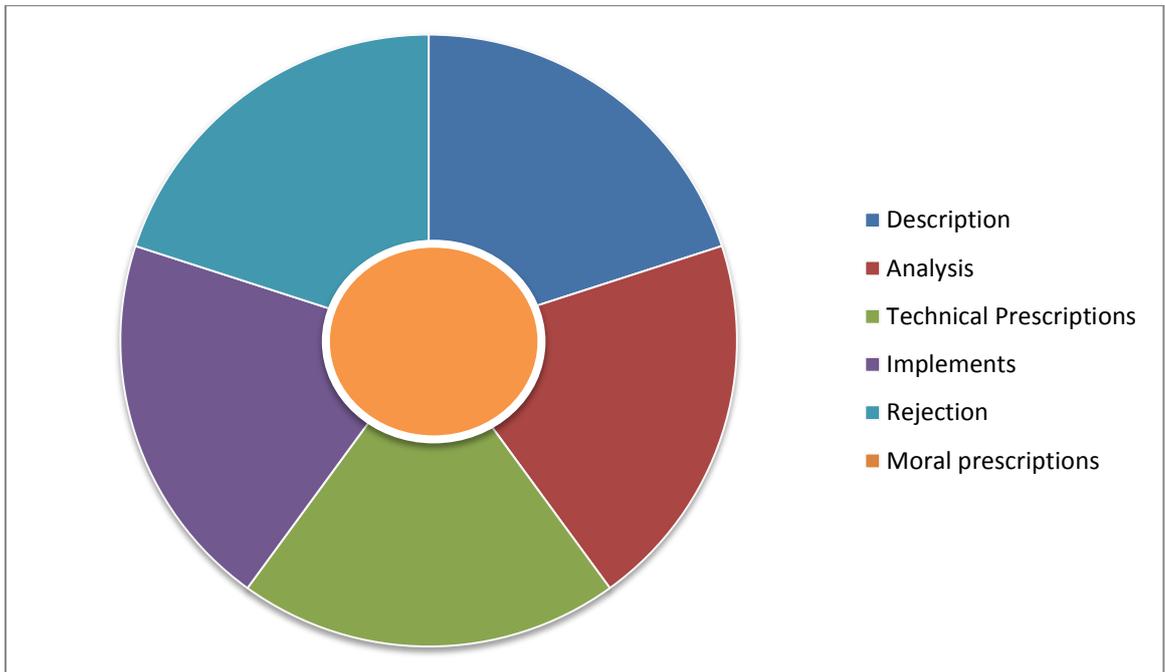
sangat mungkin menghinggapi pikiran masyarakat ketika bangsa dihadapkan dengan permasalahan disintegrasi, atau lainnya yang berhubungan dengan kehancuran bangsa. dari Fenomena itu, Gramsci menunjukkan sebuah kekuatan dari ideologi yang bahkan mampu untuk menghindarkan revolusi sosial dan menguatnya de-proletarisasi. Pengalaman penyerahan ideologi kelas proletar kepada rezim fasis dan menindas tersebut menarik perhatian gramsci untuk mencetuskan suatu konsepsi hegemoni, yang kita kenal saat ini sebagai hegemoni budaya. Hegemoni dan ideologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan sejauh bagaimana upaya penguasa dalam mewujudkan hegemoni dengan ideologi yang dibawakannya. Permisalan yang kedua, masyarakat barat menyebut demokrasi sebagai ideologi mereka secara terang-terangan sebab terlihat dengan riil dalam sistem politik yang telah berjalan.

Ideologi dan pemaknaanya menjadi kian rumit dan terkesan terlalu banyak tesis yang bermunculan dan dijadikan rujukan dalam kebutuhan studi ideologi. Namun untungnya, berbagai orang melihat ideologi dan mengambil kesimpulan secara dikotomis, artinya menghadapkan ideologi satu dengan yang lain. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Down (1957:4) dengan 4 premis: (1) Mereka memiliki suatu ideologi, sedangkan kita punya falsafah politik; (2) mereka hanya punya dogma, namun kita justru punya nilai-nilai yang berharga; (3) Mereka dipimpin tiran yang kejam, tapi kita mempunyai pemimpin dan pejuang; (4) Mereka itu fanatik dan kita teguh terhadap prinsip. Hadirnya pemikiran dikotomis tersebut, membuat ideologi tidak dapat dinilai secara ilmiah dan dipandang secara empiris. Narasi semacam ini digunakan hanya untuk menguasai orang lain. Misalnya, masyarakat amerika Serikat yang lebih mengakui dan suka menyebutkan demokrasi sebagai ideologi negaranya daripada liberalisme yang cenderung dihindari. Mereka juga lebih sukarela mengucapkan *free enterprises* daripada kapitalisme yang merupakan istilah dalam sistem perekonomian yang mereka gunakan (Warsito, 2012:122). Dari fenomena yang digambarkan di atas kiranya telah menjelaskan bahwa perjalanan intelektual ideologi telah mengalami banyak sekali perubahan, terutama tidak lagi hanya dipandang sebagai *science of idea*, namun juga sebagai distorsi realitas, landasan operasional dalam praksis sosial, hingga suatu keyakinan yang abadi.

Di era post-modern, polemik akan kebutuhan suatu bangsa dan negara soal ideologi muncul kembali pada paruh kedua abad 20. Misalnya Daniel Bell, yang

mengkaji tentang irrelevansi ideologi dalam tulisannya, *The End Of History*. Seperti gurunya, Sydney Hook, yang mengungkapkan bahwa kebutuhan akan kajian ilmiah di masyarakat modern yang menanggapi berbagai persoalan sosial, tidak akan lagi menerima suatu teori kemasyarakatan yang sistematis untuk menjelaskan perkembangan-perkembangan besar dunia meliputi historikalitas bangsa-bangsa (Hook, dalam Bachtiar, 1976). Negasi tersebut juga disampaikan oleh Martin Seliger yang mengungkapkan bahwa ideologi telah kehilangan masa-masa kritisnya. Maka ia juga memulai suatu perdebatan mengenai akhir dari ideologi itu, namun di lain sisi, ia menjabarkan secara komprehensif tentang gagasan baru ideologi dan memahaminya sebagai sebuah sistem simbol atau kepercayaan yang memiliki relasi dengan praktik politik dan tindakan sosial. Kontruksi ulang atas ideologi yang ia sampaikan mulanya akan mengaburkan konsep ideologi dan kritik atas dominasi—hubungan yang mewakili pemikiran Karl Marx untuk dipertahankan sebagian (Thompson, 1984:129). Dalam satu buku penting yang ia terbitkan pada tahun 1976, Martin Seliger menuliskan setidaknya 2 pendekatan yang mendasar akan bagaimana ideologi diinterpretasikan. Pertama, ideologi dipandang sebagai satu variabel yang memiliki keterbatasan pada satu istilah ideologi pada sistem pemikiran politik tertentu, Seliger menyebutnya dengan ‘konsepsi terbatas’. Namun di lain sisi, ia menyebutkan konsepsi kedua yakni ‘konsepsi inklusif’ yang mana akan dapat diterapkan terhadap seluruh kondisi dan sistem kepercayaan politik yang ada. Tujuan Seliger sederhana saja, Adalah mempertahankan konsepsi inklusif tersebut untuk menautkannya dengan proses-proses perdebatan politik. Tahapan pertama yang dilakukan ialah menawarkan suatu kritik imanen terhadap pemikir-pemikir yang sudah terlanjur mengikuti arus dengan menggunakan konsepsi terbatas dari Engels, Marx, maupun penggagas-penggagas ‘Akhir dari ideologi’. Kemudian Seliger menarik kesimpulan dari argumentasi-argumentasinya bahwa: “Sebagai sistem yang memiliki fungsi untuk mempertahankan dan membimbing tindakan politik tertentu, suatu ideologi niscaya harus didefinisikan agar dapat dikembalikan ke dalam sistem kepercayaan politik tertentu, terlepas dari sifatnya yang reformis, konservatif, maupun revolusioner.” (Thompson, 1984:131). Ideologi, menurut pandangan Seliger adalah suatu orientasi yang memiliki nilai-nilai, prinsip berdasarkan kepercayaan tertentu yang terorganisir

dan mengantarkan kepada suatu sistem yang koheren. Selanjutnya ia menggambarkan skema mengenai apa yang ada dalam ideologi.



Gambar 1.1 Komponen Ideologi

Sumber: Thompson (1984)

Dalam diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa ideologi mencampur-adukkan semuanya antara analisa situasi, deskripsi faktual, dan preskripsi soal moral yang berisi sistem kebaikan dan keburukan dengan pertimbangan teknis serta prinsip sumberdaya yang efisien. Seliger menjelaskan bahwa dalam suatu ideologi, terdapat campuran aneh antara dimensi realitas dan komitmen moral yang membuat ideologi memiliki daya tarik dan selanjutnya dapat membimbing tindakan-tindakan politik. Disebutkan oleh Seliger, peran dari pembimbing tindakan politik ini diperlihatkan melalui apa yang disebut *'implements'* yang berisi aturan-aturan mengenai penggunaan prinsip dalam kondisi tertentu. Variabel terakhir yang digambarkan adalah *'penolakan'*, yang memiliki arti bahwa akan selalu ada pendefinisian atas ideologi secara oposisional, di samping segala prinsip-prinsipnya; semisal dalam demokrasi konstitusional, ada pemisahan kekuasaan, yang berarti ada penolakan terhadap hak-hak suci raja. Politik dan ideologi pada akhirnya dipandang sebagai makna yang terpisah, namun akan selalu berkaitan antar-lainnya, karena sejatinya tindakan politik dengan berbagai orientasi dan bentuknya entah itu reformasi,

destruksi, konstruksi, akan dituntun oleh sebuah ideologi dan sistem kepercayaan yang ada (Thompson, 1984:131).

I.7.4 Konsep Analisis Kritis Wacana (CDA)

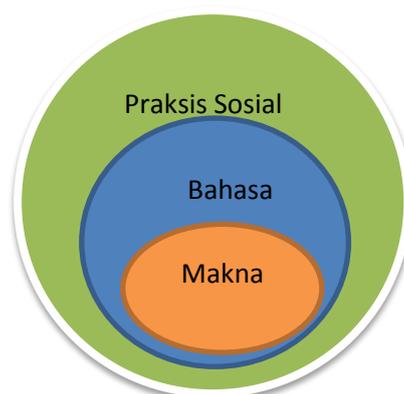
CDA atau istilah terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Analisis wacana kritis, merupakan metode baru yang ada pada studi sosial dan budaya. Simposium yang diadakan pada bulan Januari tahun 1991 di Amsterdam, negeri Belanda, dihadiri oleh berbagai pioner AWK yakni Norman Fairclough, Teun Van Dijk, G. Kress, Ruth Wodak, serta T. Van Leeuwen itu dinilai telah “meresmikan” CDA sebagai salah satu metode penelitian di ilmu sosial dan budaya. Mereka Berlima mendiskusikan secara ilmiah perihal pengembangan Analisis Kritis Wacana dengan pendekatan masing-masing serta berbagai teori yang mendasarinya agar CDA mampu berkembang di masa depan (R. Wodak & M. Meyer, 2009:3).

Haryatmoko (2016) Melalui bukunya mengatakan bahwa kesepakatan yang terjalin saat pertemuan tersebut adalah tentang penerimaan tiga postulat CDA, yakni: (1) seluruh pendekatan wajib memiliki orientasi terhadap masalah-masalah sosial, maka selanjutnya akan dituntut dengan pendekatan lintas-keilmuan; (2) kekhawatiran utama adalah pendemistifikasian ideologi serta kekuasaan dengan penelitian data semiotik (tulisan, visual, dan lisan); (3) Peneliti selalu reflektif dalam proses penelitian dengan mengambil jarak tertentu dalam proses pemeriksaan nilai dan pelacakan ideologi. Ketiga hal tersebut memberikan sudut pandang baru dalam bidang penelitian dan menggunakan konsep yang beragam. Menariknya, AWK membuat beberapa peneliti tertarik untuk menggunakannya sebagai metode penelitian, karena AWK selalu membuka sudut pandang yang sangat luas guna memecahkan permasalahan ketidakadilan, dominasi, dan kekuasaan yang diskriminatif.

Analisis kritis wacana pada umumnya memang terinspirasi dengan pemikiran kritis, yang awalnya dibawakan oleh Mazhab Frankfurt, dengan tesis awalnya yaitu bahwa proses budaya yang muncul dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial dalam rangka melawan dominasi, ketidakadilan, serta diskriminasi. Penelitian ini disebut kritis karena mencoba mengulik tentang apa yang tidak ‘beres’ di masyarakat, dengan cara mencari sumber-sumbernya atas perlawanan yang terjadi. Makna kritis itu sendiri ditelusuri dalam empat bentuk analisis: pertama, melakukan

analisis terhadap hubungan semiosis, hubungan yang terjadi ketika semiosis dapat memproduksi/menentukan/mengubah ketidakseimbangan kekuasaan serta proses ideologisasi; kedua, hubungan itu memerlukan analisis sebab memiliki unsur-unsur yang menyesatkan atau tersembunyi, sehingga harus diungkap; ketiga, dominasi logika dan dinamika agar diuji, dan jika bisa ditantang oleh masyarakat, kemudian dicarikan sesuatu yang dapat menyelesaikannya; keempat, peneliti mengambil jarak terhadap data yang ada, mengkontekstualisasikan data, serta memberikan klarifikasi atas posisi politik partisipan, dan pada penelitian yang dilakukan, agar sering melakukan refleksi diri (T. Van Dijk in: Wodak, 2008: 63-64).

Pengaruh yang tidak bisa diabaikan dalam CDA ini tentunya adalah konsepsi wacana milik filsuf post-strukturalisme, yaitu Michel Foucault. Foucault mengatakan bahwa wacana adalah suatu sistem pengetahuan yang menyampaikan informasi akan teknologi sosial serta teknologi pemerintahan—inilah bentuk kekuasaan masyarakat modern. Pioner-pioner CDA, dengan seksama menyatakan bahwa mereka terinspirasi oleh gagasan-gagasan Foucault misalnya tentang pengetahuan, kekuasaan, kebenaran dalam sebuah wacana. Wacana dipandang sebagai bahasa dari peristiwa sosial, atau bahasa tersebutlah yang menjadi praksis sosial. Bahasa disediakan oleh wacana untuk membuat suatu pernyataan—sebagai representasi pengetahuan—pada periode sejarah dan topik tertentu. Foucault tertari terhadap wacana sebagai praktik dan aturan yang menghasilkan berbagai permasalahan yang bermakna dalam satu periode sejarah, yang berarti ada satu struktur pemaknaan dimana ia berkembang dalam satu konteks waktu (Foucault, 1969: 55-57). Ia menyebutnya sebagai episteme, sebagai penjelasan atas dominasi struktur pemaknaan di suatu zaman. Cara memahami keterkaitan antara kekuasaan, kebenaran, dan pengetahuan yang tidak dapat lepas dari wacana ialah bahwa peristiwa/praksis sosial tidak dapat terlepas dari makna, dan makna memerlukan bahasa, sedangkan makna mempengaruhi sekaligus menajamkan apa yang dilakukan manusia, maka seluruh praksis sosial tidak dapat terlepas dari dimensi wacana. Berikut skema tentang bahasa, makna, dan praksis sosial:



Gambar 1.2 Skema Wacana

Sumber: Penulis

Dalam definisi wacana menurut Ricoeur (1986:104) yang memiliki 4 unsur: (1) Siapa yang menyampaikan atau subyek yang menyampaikan harus ada; (2) Kepada siapa hal itu disampaikan; (3) hal apa—gagasan/wahana—yang mau disampaikan; (4) Pada konteks waktu/kapan. Penjelasan akan 4 unsur tersebut akan dapat membantu menjelaskan bagaimana Foucault memandang wacana selaku praksis sosial, artinya wacana sudah merupakan tak lain adalah tindakan. Maka wacana dapat dianalisis bersamaan dengan teknologi komunikasi serta relasi-relasi sosial. Bentuk utamanya semisal kegiatan peribadatan, wawancara, kuliah, dan perdebatan. Sedangkan bentuk sekundernya meliputi olahraga, membangun rumah, dan kerja bakti (Haryatmoko, 2016:5). Wacana sebagai praksis sosial tentunya sejalan dengan penerapan CDA sendiri, yakni analisa yang melibatkan struktur sosial bersama segala permasalahannya, untuk kemudian mempertahankan atau mengubahnya. Bahkan CDA atau AWK mencari solusi atas manipulasi yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat—bisa jadi konfrontasi dan konflik—karena tidak puas dengan hanya fokus terhadap ketidakadilan, diskriminasi, prasangka, atau penderitaan. Permasalahan tersebut timbul disebabkan penggunaan serta produksi bahasa dan bentuk lain dari komunikasi yang cenderung merugikan dan tidak bijak. Tersembunyinya maksud yang akan terus dicari oleh metode dan konsep ini pada akhirnya akan menghasilkan kesadaran dan terlihatnya perubahan.

Ada delapan prinsip Critical Discourses Analysis menurut Jaffer Sheyholislami (Eriyanto, 2001):

1. Bahasa sebagai praksis sosial yang menjelaskan bagaimana realitas sosial di masyarakat.
2. Wacana atau bahasa tidak ditampilkan luarnya saja, namun membedah apa saja makna yang menyelubunginya—termasuk kekuasaan, dominasi, dan stereotip.
3. Teks merupakan hasil dari proses dialektika antar teks itu sendiri, yang kemudian membuat pembaca menginterpretasikannya atau bahkan penulis sebagai subyek sosial dapat selalu memilih cara-cara untuk menginterpretasikan teks tersebut.
4. Deskripsi soal wacana bukanlah hasil sesungguhnya yang benar-benar final, namun akan ada berbagai tujuan tertentu yang entah disadari maupun tidak.
5. Dari wacana, terdapat relasi kekuasaan yang merupakan hasil dari produksi dan kemudian dipraktikkan sehingga dapat memproduksi ulang dalam bentuk wacana.
6. Wacana selalu memperhatikan konteks, tidak mungkin suatu wacana satu dengan yang lain memiliki makna yang sama. Artinya, terdapat variabel lain yang mempengaruhi atas produksi wacana.
7. Seluruh penulis dan pembicara atau seluruh penutur wacana bekerja sesuai kepentingan-kepentingan tertentu.
8. CDA tidaklah hanya mengartikulasikan teks, namun juga mengeksplorasinya secara mendalam dan komprehensif.

Dari ke-delapan prinsip tersebut, juga terdapat 5 karakteristik atas pendekatan-pendekatan yang ada pada AWK, yakni:

1. Aktivitas yang berupaya melihat wacana sebagai proses interaksi yang berlandaskan kepentingan-kepentingan tertentu dan bertujuan mendebat, memanipulasi, menguasai, menyangga, bereaksi, merespon, dan lain-lain.
2. Tidak lepas dari konteks, yaitu konteks seperti siapa dan dimana peristiwa tersebut terjadi, bagaimana hubungan antar dua pihak yang berinteraksi, situasi apa yang sedang terjadi, dan melalui medium apa wacana tersebut disampaikan.
3. Konteks sejarah, artinya ketika mencoba memahami makna atas wacana yang diproduksi, tidak akan mampu apabila tanpa menyertakan kondisi sosio-kultural dan historis yang terjadi pada saat itu.
4. Kekuasaan. Bahwa wacana yang disampaikan dan saat mencoba memaknainya, berarti tidak terjadi secara alamiah melainkan terdapat pertarungan kekuasaan yang terjadi dalam wacana tersebut.

5. Ideologi. Wacana disampaikan untuk mempengaruhi pembaca, pemerhati, atau subyek lain agar dapat menciptakan suatu kesadaran palsu.

Untuk itu, terdapat 5 jenis pendekatan AWK atau CDA yang selama ini telah ada:

1. Pendekatan Analisis bahasa kritis yang dibangun oleh para pengajar di Universitas East Anglia pada tahun 1970-an yang banyak terinspirasi dari pola sistemik bahasa milik Halliday. Analisa ini mencoba menguak cara kerja bahasa melalui metode gramatika mengenai makna dan posisi makna dari pemilihan-pemilihan bahasa yang digunakan.
2. Pendekatan perancis yang banyak dipengaruhi oleh konsepsi ideologi milik althusser dan gagasan mengenai wacana Michel Foucault. Pada pendekatan ini, banyak menekankan bahwa bahasa merupakan hasil dari kristalisasi ideologi yang mana di dalamnya terdapat pertarungan ideologi, perebutan-perebutan pengaruh antar pihak—berbagai kelompok maupun kelas sosial.
3. Pendekatan Kognisi Sosial. CDA pendekatan ini dicetuskan oleh Teun Van Dijk, pendekatan ini berangkat bagaimana kognisi sosial terlibat dalam produksi wacana. Artinya, pemilihan bahasa serta penguatan wacana dipengaruhi oleh kognisi personal.
4. Pendekatan sejarah pada CDA menekankan pada konteks kapan dan pada kondisi apa wacana tersebut diproduksi. Artinya, pemakaian pada sebuah wacana tidak hanya dipengaruhi oleh realitas sosial yang terjadi saja, melainkan runtutan sejarah yang membentuk wacana tersebut sehingga menjadi kuat. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh pendekatan genealogi Foucault serta beberapa konsepsi milik Jurgen Habermas.
5. Pendekatan perubahan sosial, yang menautkan relasi antara pembentukan serta kehadiran wacana terhadap praktik-praktik sosial. Pendekatan ini memaksimalkan keterlibatan aktor-aktor yang bekerja untuk mempertahankan status quo melalui wacana dan melibatkan lebih jauh wacana tersebut pada masyarakat. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh Foucault dan para pemikir intertekstualis Bakhtin serta Julia Kristeva.

Memahami konsepsi wacana menjadi keharusan yang begitu penting atas penerapan AWK, sebab pada intinya ada asumsi dasar bahwa adanya bahasa disertai penggunaannya dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi. Bahasa dapat digunakan untuk menguasai, memerintah, memanipulasi, mengiba, atau bahkan

membujuk. Setiap penggunaan yang menimbulkan konsekuensi itu, ada yang dapat diprediksi ataupun tidak diinginkan. Di sisi lain, bahasa juga memiliki fungsi kontrol sosial yang begitu kuat sehingga dapat menggerakkan subyek yang dituju, dan kemudian dapat disanggah atau diperdebatkan. Maka, makna disini yang lebih banyak mengambil tempat atas tujuan analisa kritis wacana dan apa saja unsur di luar bahasa yang mempengaruhinya.

I.8 Diskusi Teoritik

I.8.1 Teori Hegemoni Budaya Antonio Gramsci

Filsafat yang berkembang di berbagai belahan dunia sama sekali tidak bersifat statis, namun senantiasa bergerak mengikuti kehendak zaman, sama persis dengan ilmu pengetahuan. Di era modern, kita mengenal banyak filsuf salah satunya Karl Heinrich Marx. Marx juga merupakan pencetus beberapa teori-teori ilmu sosial, ekonomi, maupun politik dasar. Ia dikenal sebagai Hegelian kiri, yang menggunakan beberapa pemikiran Hegel dengan metode kritis. Maka, filsafat yang dicetuskan oleh Karl Marx ialah filsafat praksis, yang erat kaitannya dengan kebudayaan modern. Artinya, filsafat Marx selalu terbaharui di samping pembaharuan sejarah, tidak fana, dan selalu berkembang mengikuti kemajuan peradaban.

Salah satu landasan teori ekonomi politik Marx yang menonjol ialah hegemoni, yang berawal dari penemuannya tentang fenomena 2 kelas yang saling berlawanan, saling menindas dan ditindas, saling menghisap dan dihisap, yaitu kelas borjuis dan proletar. Bedanya, Borjuis memiliki segala alat produksi, modal, dan dapat menjalankan sistem kerja upah sekaligus menerima banyak keuntungan atas kepemilikan tersebut, sedangkan kelas Proletar kebalikannya, mereka adalah buruh yang tak memiliki alat produksi sendiri sehingga mau tidak mau bekerja dengan kelas borjuis agar dapat memenuhi kebutuhan dan melangsungkan hidup. Namun, Marx memandang dari sistem kerja upah tersebut menyebabkan kelas proletar sengsara dan teralienasi. Keterasingan yang dialami kelas proletar sebagai manusia tidaklah lazim. Harusnya, ketika buruh sebagai manusia biasa ini bekerja (misalnya 16 jam sehari), tidak ada akses untuk menyenangkan diri, dia tidak dapat hidup bebas sejahtera seperti para pemilik modal, dan inilah yang akhirnya dipandang Marx sebagai proses hegemoni. Hegemoni, diartikan Marx sebagai dominasi kelas borjuis terhadap kelas proletar (Fakih, 2002:145).

Jika hegemoni menurut Marx adalah penguasaan atau dominasi yang mengutamakan instrument yang berorientasi ekonomi, maka lain halnya apa yang disampaikan oleh Antonio Gramsci. Gramsci merupakan salah satu tokoh marxian yang justru melakukan kritik atas berbagai buah pemikiran Marx, yakni salah satunya perubahan sosial. Tereduksinya konsep hegemoni menurut kalangan marxian ortodoks yang meyakini misalnya *base* (ekonomi) yang mempengaruhi *superstructure* (sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya). Maka, transformasi sosial serta praktik sosialisme menurut kalangan ortodoks ini harus dimulai dengan revolusi kelas dan cenderung ekonomisme. Artinya, mereka memaknai kelas sosial hanya didasarkan pada kelas ekonomi saja sekaligus inilah yang membuat kelompok sosial seperti gerakan perempuan, gerakan lingkungan, gerakan masyarakat adat diabaikan. Padahal, menurut Gramsci, justru kekuatan sesungguhnya yang ada pada masyarakat modern terletak pada kelompok-kelompok yang lebih luas, yakni *civil society*. Gerakan buruh dinilai oleh Gramsci juga termasuk dari model gerakan ini, dan begitu pun sebaliknya (Fakih, 2002:140). Pemikiran Gramsci memang menjadi otokritik tersendiri bagi pemikiran Marx yang positivistik, terutama soal perubahan sosial dan revolusi. Pengembangan landasan teori perubahan sosial khususnya hegemoni budaya, didapatkan semenjak ia hidup di Italia saat Mussolini berkuasa. Rezim fasis waktu itu mendapat perhatian Gramsci saat proses-proses politik tertentu. Misalnya, perilaku rezim Mussolini untuk menindas para buruh ternyata tidak dapat menghasilkan revolusi sosial, justru menguatnya dukungan dari kaum buruh untuk melanggengkan kekuasaan Mussolini (Fakih, 2002:142).

Pada hal, menurut Marx, penindasan akan melahirkan sebuah gerakan dari rakyat yang ditindas untuk melakukan perubahan atau revolusi sosial. Dari fenomena ini, Gramsci akhirnya membuka seluas-luasnya perihal gerakan dari *civil society* yang tak membatasi pada gerakan kelas buruh, namun seluruh masyarakat beridentitas budaya, sosial, agama yang juga merasakan ketidakadilan dari rezim yang berkuasa. Maka, kelompok-kelompok yang tidak tereduksi serta memiliki keunikan yakni dalam sisi pendidikan yang didapat, ia menyebut kelompok-kelompok yang memiliki potensi untuk melakukan gerakan guna mewujudkan transformasi sosial dengan sebutan *Intellectual organic*. Itulah kaitan antarperkembangan sosial masyarakat yang ada pada zamanya yang akhirnya memunculkan konsep dasar soal hegemoni, yang

berawal dari tesis Marx soal transformasi sosial dan akhirnya dipatahkan oleh fenomena fasisme di Italia. konsep itu populer dengan sebutan hegemoni budaya yang menurutnya bersifat dinamis sebab bersamaan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di dunia sehingga rezim di berbagai negara tidak lagi menggunakan banyak represifitas, namun menggunakan ideologi untuk mencapai kesepakatan antara mereka sebagai kelas yang berkuasa atau negara dengan kelas yang dikuasai yakni rakyat.

Antonio Gramsci, dalam buku legendarisnya yakni *Prison Notebooks*, buku yang tergugus dari catatan-catatan yang ia tulis—saat ia dipenjarakan oleh rezim fasis Musollini dan menjadi tahanan politik—menafsirkan bahwa hegemoni di era kontemporer menunjukkan penguasaan dengan landasan instrumen intelektual oleh kelas yang berkuasa serta dominan terhadap kelas yang dikuasai meliputi berbagai lapisan masyarakat di negara kapitalis. Kelas yang berkuasa tersebut, tidak serta merta menggunakan kekerasan, namun justru memanfaatkan penguasaan kesadaran kelas yang dikuasai dengan ideologi. Alhasil, tidak ada perlawanan yang berarti karena hegemoni tersebut telah mencapai sebuah konsensus antar banyak pihak termasuk kelas yang menguasai dan dikuasai (Gramsci, 2013:167).

Gramsci dari awal sudah menolak konsep determinasi milik Marx yang memusatkan seluruh tindakan sosial dan dinamika masyarakat terhadap basis ekonomi, dan menurutnya, basis ideologi yang menaungi superstruktur lain, memiliki independensinya sendiri. Meminjam tipologi dari Stuart Hainworth (2000), bahwa teori tentang hegemoni budaya berawal dari gagasan bahwa tiada satupun, dari negara, pemerintah, maupun kelompok lain yang dapat menguasai masyarakat dan kelas-kelas sosial jika tidak dilakukan secara intelektual. Hegemoni adalah bentuk dari kekuatan politik melalui pemimpin moral, intelektual, dan tidak menekankan represifitas atau kekerasan sebagai jalan utama. Hegemoni dilakukan oleh kelas dominan atau penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dan menciptakan konsensus politik serta budaya melalui media, sekolah, tempat peribadatan, serta institusi-institusi lain. Maka, seluruh instrumen yang memiliki hubungan dengan negara, memang dimanfaatkan pemerintah untuk mengukuhkan posisinya dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Menurut Gramsci, Ideologi menjadi instrumen hegemoni yang melancarkan para penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi ini dibawa oleh para aparaturnegara untuk melakukan hegemoni tersebut kepada civil society (sebab di era post-modern hingga sekarang sangat kompleks jika berbicara masalah kelompok sosial-politik) terutama kaum proletar yang secara langsung maupun tidak langsung akan mengikuti gaya hidup para elit yang memerintah. Hegemoni menyebabkan Ideologi dari golongan yang mendominasi diambil alih secara sukarela oleh golongan yang didominasi. Pada prosesnya, hegemoni akan berpengaruh juga terhadap cara berfikir, pola kehidupan sosial, keyakinan beragama, dan tingkat intelektual kelompok yang didominasi (Williams, 1960).

Althusser (1971) mengafirmasi pemikiran Gramsci yang menempatkan aparaturnegara tidak hanya pada lingkup negara itu sendiri melainkan mencakup sejumlah lembaga tertentu, dari yang publik hingga privat; keluarga, agama, komunikasi (media massa) hingga pendidikan. Meski dalam kekurangannya, Gramsci tidak menjelaskan secara detail apa saja struktur dan sistem atas lembaga yang disebutkan, namun cukup fragmentatif. Gramsci berpendapat, bahwa hegemoni dilahirkan oleh kelompok dominan yang bukan hanya ingin memimpin, namun ingin mendominasi secara ideologis dan sistemik (Jones, 2006).

Secara bertahap, hegemoni dimulai dengan transfer ideologi dari kelompok yang berkuasa dan dominan terhadap masyarakat dengan pelbagai cara yang non-represif sehingga melahirkan kesepakatan. Selain itu, dalam arena masyarakat, terdapat pertarungan untuk memenangkan penerimaan publik, dan di sampingnya ada strategi untuk memenangkannya, yang oleh Budianto (2011) disebut sebagai *common sense* atau nalar awam. Jadi, jika nalar awam yang merupakan representasi dari ideologi itu dapat tersebar dan disepakati, maka hegemoni dapat dikatakan sudah beroperasi. Bentuk dari kesepakatan itu hendak melahirkan suatu kelompok masyarakat sipil. Mulanya, gramsci membagi 2 kelompok masyarakat, yakni kelompok sipil dan masyarakat politik. masyarakat sipil merupakan hasil dari hegemoni dari seluruh kelompok sosial secara nasional melalui institusi-institusi yang lebih privat seperti gereja, sekolah, serta perdagangan (Bates, 1975; Fernia, 1981).

Terakhir, gramsci percaya jika hegemoni adalah bagaimana kepemimpinan dan dominasi beriringan sekaligus untuk mencapai suatu kekuasaan dalam

masyarakat. Biasanya, pemimpin tidak hanya menempatkan pusran ekonomi atau yang biasa disebut marx sebagai infrastruktur sebagai pilihan utama, namun juga menempatkan infrastruktur—basis ideologis dan kultural beriringan dengan itu, karena suprastruktur juga memiliki otonomi relatif yang kemudian dapat memperngaruhi bahkan secara penuh infrastruktur, dan tak disangkal pula erdapat hubungan timbal balik (Underwood, 2003).

I.9 Metodologi Penelitian

I.9.1 Fokus Penelitian

Penelitian dengan fokus yang ditujukan kepada interpretasi sekaligus pengembangan wacana dari topik penelitian penulis yaitu bagaimana konstruksi Pancasila oleh Rezim Joko Widodo sebagai subyek politik yang memproduksi wacana ideologi anti-Pancasila yang dituangkan dalam Teks pidato kenegaraan pada hari peringatan kelahiran Pancasila dan berita-berita yang diproduksi oleh Media daring Indonesia serta apa makna yang tersembunyi dalam wacana tersebut.

Pancasila: Ideologi yang digunakan oleh rezim orde baru hingga pasca orde baru sebagai instrument hegemoni untuk melawan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dengan berbagai tujuan politik.

Hegemoni: Konsensus atau hasil dari proses penyatuan berbagai opini, elemen, serta sikap-sikap politik yang dilandasi dengan basis ideologi, budaya, atau komponen suprastruktur yang lain sehingga masyarakat dan sistem sosial dapat mencapai kondisi tertentu.

Ideologi Anti-Pancasila: Penafsiran rezim orde baru terhadap ideologi komunisme, neoliberal, serta islam radikalisme yang dilarang oleh undang-undang dan dianggap bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi yang tidak dapat digantikan. Tentunya maksud-maksud itu memiliki tujuan politis dan tidak lepas dari dinamika sejarah.

I.9.2 Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian Konstruksi Pancasila Sebagai Instrumen Hegemoni Negara melalui Wacana Ideologi Anti-Pancasila Kepemimpinan Joko Widodo adalah kualitatif dengan metodologi Analisis Wacana Kritis milik Norman Fairclough. Fairclough memulai metode ini dengan suatu rumusan masalah induk, bagaimana menghubungkan pelbagai teks yang diproduksi dalam skala mikro terhadap konteks sosial-politik masyarakat dalam skala makro. Kelebihan dari metode tersebut ialah pembangunan model analisis wacana yang memiliki fungsi serta kontribusi kepada analisis sosial, politik, dan budaya dengan menggabungkan keduanya dengan tahapan-tahapan yang sederhana. Fokus yang dipakai oleh Norman adalah bagaimana ia melihat kekuasaan beroperasi dalam proses penggunaan bahasa—lebih tepat dan luasnya wacana tersebut diproduksi atas alasan kekuasaan yang sedang berdinamika. Maka, dalam wacana terdapat sebuah makna, yang disampaikan melalui bahasa, dan dalam makna tersebut bisa dilacak di manakah ideologi terletak dan ideologi apa yang coba dikonstruksikan oleh produsen wacana (Fairclough, 1998: 131-132). Dalam suatu perspektif, Fairclough mengatakan bahwa bahasa secara tidak langsung memiliki dampak dan konsekuensi yang besar dalam penggunaannya. Bahasa tidak netral, melainkan artikulasi dalam wujud lain sebuah tindakan, dan tindakan tidak tiba-tiba ada, tapi punya hubungan khusus dengan struktur masyarakat secara sosial, politik, maupun budaya.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kritis, sebab menjadi landasan dari AWK. Posisi pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis realitas melalui teks tematik tentang politik, gender, ideologi, dan hegemoni (Haryatmoko, 2016). Kemudian, dengan pendekatan ini pula penulis merasa akan dapat melacak keberadaan ideologi apa yang dibawakan oleh para penguasa setelah orde baru dalam wacana pancasila. Seperti prinsip dasar CDA sebagai metode, maka akan wajar jika bahasa yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dan disampaikan sebagai wacana oleh para pemimpin era pasca-orde baru, kemudian dengan harapan besar dapat terlacak ideologi yang ada di dalamnya—untuk menguasai pemikiran, tindakan, dan budaya seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Realitas inilah yang tidak berdiri sendiri namun selalu dipengaruhi oleh komponen historis, sosial dan politik sehingga dapat sejalan dengan pendekatan kritis. Metode

yang penulis gunakan juga bertujuan agar penulis dapat membahas secara komprehensif akan permasalahan penelitian yang ada, dan dapat terus merefleksikan diri dalam proses penelitian.

Dengan basis analisis terhadap teks, peneliti melihat wacana tentang Pancasila yang disampaikan oleh penguasa era setelah orde baru bukan merupakan suatu yang netral, tidak memiliki kepentingan, dan bebas nilai, namun sebaliknya disitulah terdapat pertarungan antar ideologi untuk memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Peneliti juga akan menjadikan teks dengan tidak menganalisisnya secara kebahasaan, namun secara kontekstual, dan menghubungkannya dengan praksis sosial serta kurun waktu tertentu.

I.9.3 Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah wacana-wacana yang diproduksi oleh Rezim Joko Widodo dan kemudian dimuat dalam berita-berita Media Daring seperti Kompas.com dan Republika.co.id. Penulis memilih dan memilah apa saja wacana Ideologi Anti-Pancasila yang terkandung dalam isi Pidato kenegaraan pada peringatan hari kelahiran Pancasila tahun 2017, dan kemudian diproduksi secara masif dalam bentuk berita-berita oleh portal media daring. Pemilihan tersebut berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian yakni pelbagai obyek tersebut dinilai akan dapat merepresentasikan pewacanaan ideologi Anti-Pancasila pada era Kepemimpinan Joko Widodo. Mengapa penulis menggunakan kata Rezim sebagai subyek produsen wacana? Karena penulis menganggap bahwa Presiden adalah pemimpin tertinggi dalam sistem demokrasi Indonesia dan subyek-subyek lain yang memiliki visi sama dan hubungan yang dekat dengan Presiden—misalnya pejabat kementerian, staf khusus Presiden—dianggap penulis memiliki persepsi yang sejalan dengan Presiden karena faktor relasi kekuasaan. 2 Ideologi yang dianggap berseberangan sesuai dengan latar belakang permasalahan juga sesuai dengan konteks waktu tepat pada saat subyek-subyek tersebut berkuasa.

Secara Khusus, Objek penelitian penulis adalah:

1. Teks pidato Presiden republik Indonesia pada saat memperingati hari kelahiran Pancasila tahun 2017. Teks pidato tersebut dimuat dalam artikel salah satu media elektronik Kompas.com.

2. Pelbagai Berita yang memuat wacana Ideologi anti-Pancasila dalam portal berita daring Kompas.com
3. Berita-berita yang terdapat muatan wacana Ideologi Anti-Pancasila dalam portal berita daring Republika.co.id

Penulis menaruh pilihan kepada *Kompas.com* dan *Republika.co.id* sebagai media pewacanaan ideologi Anti-Pancasila karena beberapa alasan. Pertama, kedua media massa digital tersebut dalam kurun waktu belakangan—khususnya pilpres 2014 hingga beberapa tahun pemerintahan Joko Widodo berjalan—memiliki posisi politik yang berbeda; *Kompas.com* pada pilpres 2014 mendukung pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla dan pasca-pilpres, *Kompas.com* masih memiliki posisi yang sama jika ditelusuri dalam berita-beritanya (Tapsell, 2017:215). Sementara *Republika.co.id* berada di kubu oposisi selama pilpres 2014 dan cenderung secara reguler memberitakan pasangan calon Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan berita-berita bernuansa negatif (Musthafa, 2017). Kedua, faktor ideologis kedua media tersebut menjadi pertimbangan manakala *Kompas.com* adalah media yang sekuler—yang tak terlepas dari sejarah pendiriannya oleh kelompok minoritas katolik di masa orde baru dan *Republika.co.id* media bernuansa islam yang membela kepentingan-kepentingan umat islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Hal tersebut akan berguna bagi penulis untuk mengkaji topik wacana Ideologi Anti-Pancasila yang melibatkan kelompok-kelompok islam khususnya pada sub-wacana Radikalisme islam dan sub wacana Komunisme. Ketiga, secara terpisah penulis memilih *Kompas.com* karena media ini menganut jurnalisme yang kritis, namun ‘terbatas’. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Jakob Oetama selaku pemilik Kompas oleh Keller (2009), Kompas kerap diejek dengan sebutan ‘jurnalisme kepiting’ karena kehati-hatiannya dalam pemberitaan dan kebahasaan jurnalismenya. Pemilik *Kompas.com* juga tidak terlibat dalam aktivitas politik serta kontak politik secara langsung sejauh yang penulis telusuri—berbeda dengan media-media naungan *CT Corp* yakni CNN Indonesia, atau Jawa Pos yang juga memiliki media massa digital *jpnn.com* yang pemiliknya (Chairul Tanjung dan Dahlan Iskan) terlibat dengan aktivitas politik dan dekat dengan politisi. Namun, secara mengejutkan posisi *Kompas.com* dalam pemberitaannya cenderung memiliki posisi politik yang tegas, dan menurut penulis, hal inilah yang menjadi menarik. Sementara *Republika.co.id*, punya posisi yang tegas

dalam politik. Media ini dimiliki oleh Erick Thohir, salah satu taipan terkaya di Indonesia. Oleh karena itu, *Republika.co.id* juga cenderung memasukkan kepentingan pemiliknya dalam agenda pemberitaan, meskipun dengan negosiasi dan kompromi (Keller, 2009).

I.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Tidak ada klasifikasi data primer maupun sekunder dalam proses pengumpulan data yang penulis lakukan. Penulis akan melakukan penelusuran berbagai data kepustakaan sesuai dan konsisten dengan metode penelitian CDA yang penulis gunakan. maka seluruh data yang dikumpulkan berupa Teks dalam bentuk pidato, dan artikel pemberitaan pada berita daring *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. berita-berita yang dikumpulkan penulis berdasarkan periodisasi pemberitaan dengan topik berwacana ideologi Anti-Pancasila yang secara detail yakni:

1. Berita *Kompas.com* berwacana Ideologi Anti-Pancasila dalam kasus pembubaran HTI dan Penerbitan Perppu Ormas: 19 Juli 2017 – 9 Agustus 2017
2. Berita *Republika.co.id* berwacana Ideologi Anti-Pancasila dalam kasus pembubaran HTI dan Penerbitan, dan Pengesahan Perppu Ormas: 14 Juli 2017 – 27 Oktober 2017
3. Berita *Kompas.com* berwacana Ideologi Anti-Pancasila dalam kasus Kontroversi RUU HIP: 14 Juni 2020 – 25 Juni 2020
4. Berita *Republika.co.id* berwacana Ideologi Anti-Pancasila dalam kasus Kontroversi RUU HIP: 12 Juni 2020 – 10 Juli 2020

Selain itu, agar menguatkan basis teoritik, mengingat studi yang dilakukan oleh penulis bukan studi lapangan atau studi kasus, maka penulis lebih banyak menelusuri karya-karya ilmiah yang dibutuhkan sebagai rujukan. Dengan catatan khusus, bahan literatur tersebut harus relevan dengan topik yang penulis ambil.

I.9.5 Teknik Analisis Data

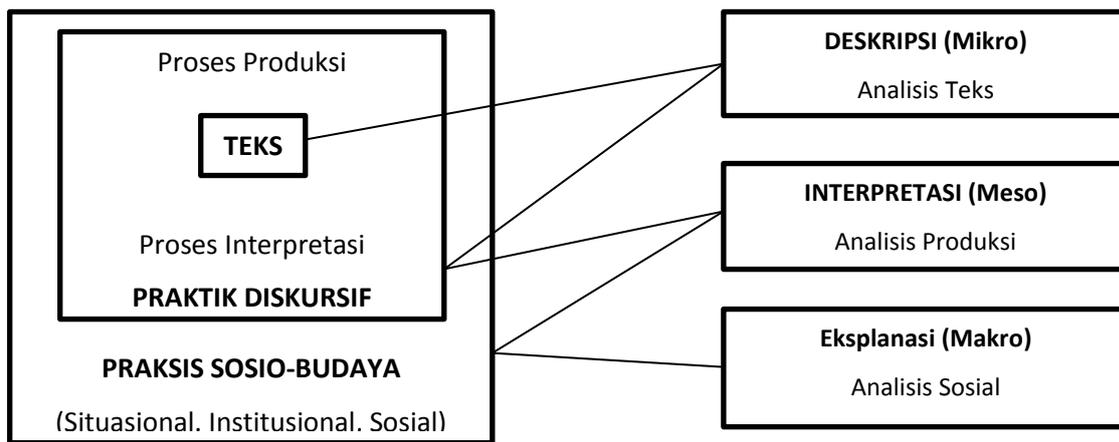
Van Dijk (2009:63) mengartikan Analisis Wacana Kritis bermaksud menganalisa bagaimana wacana yang diproduksi dengan relasi kuasa dapat menghasilkan suatu dominasi, penyalahgunaan wewenang, dan bagaimana subyek atau kelompok yang didominasi membentuk wacana untuk melawan dominasi oleh penguasa. Analisis ini memerlukan pendekatan multidisiplin keilmuan sebab dalam

merespon berbagai obyek penelitian yang diperlukan. Untuk memahami dimensi makro dari analisis wacana kritis ini, wacana ditempatkan sebagai praksis sosial politik, yang mana Ilmu-ilmu tersebut bertugas untuk mengungkap apa yang sedang bekerja dan beroperasi dalam wacana.

Praksis sosial mengarahkan wacana agar dianalisis melalui situasi, institusi, struktur yang ada dalam masyarakat, hubungan antar-kelompok, dan yang lebih penting ialah proses sosial politik yang terlibat dalam proses pembentukan wacana. Jadi, analisis kritis wacana sebenarnya mengelaborasi spektrum mikro dan makro yakni struktur wacana bersama struktur masyarakat—dan hubungan itu adalah proses semiosis.

Fairclough dalam (Haryatmoko, 2016) menyampaikan bahwa Analisis Wacana Kritis harus benar-benar memperhatikan 3 dimensi, yakni Teks, Praktik Diskursif, serta Praksis sosial. Secara sederhananya, Teks berarti seluruh bentuk dari hasil komunikasi: tulisan, grafik, retorika, pembicaraan, dan seluruh bentuk yang meliputi teks linguistik. Kemudian, praktik diskursif, yang berupaya mengulas apa yang mempengaruhi teks—bagaimana teks tersebut bisa terbentuk (skala mikro) dan mengapa teks tersebut diproduksi—yang secara langsung melibatkan subyek pembuat teks dan tugas peneliti di sini ialah menginterpretasi teks dengan hubungan produksi dan konsumsi teks tersebut—bahkan boleh mengulik genre atas teks sekaligus diharuskan menginterpretasi relas kuasa atas kehadiran teks.

Bagian yang terakhir dari dimensinya Fairclough dalam analisis wacana kritis adalah praksis sosial. Dalam dimensi ini, skalanya tidak lagi mikro dan berhubungan dengan teks, namun sudah mengulas faktor eksternal dan struktur sosial masyarakat di samping produksi teks berlangsung. Dalam dimensi ini, biasanya peneliti akan membongkar seluruh keadaan, situasi sosial politik yang terjadi sesuai konteks, dan jaringan-jaringan yang erlibat dalam kemunculan teks. Fairclough (1995:98) membuat skema berikut:



Gambar 1.3 Skema Dimensi Analisis Wacana Kritis

Sumber: Haryatmoko (2016)

Secara detailnya, dalam menganalisis teks, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata dalam teks yang mengacu kepada makna-makna tertentu, sebab tiap kata meskipun memiliki arti yang sejajar, namun bukan berarti punya makna yang sama, sebab dalam pemilihan kata tersebut ada suatu tindakan yang hendak dilakukan. Sederhananya, bahwa satu buah kata bisa memiliki banyak makna, cara memverifikasinya ialah dengan mengaitkan kata tersebut dengan konteksnya—kalimat sebelum, atau sesudah kata tersebut, tema apa yang sedang dibawakan dari teks, maupun subyek yang ada dalam teks tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam segi kata ialah fungsi tekstual, yang perlu penglihatan lebih jeli tentang kohesi ialah keterpaduan antar-kalimat, sedangkan pada bagian struktur teks, yakni logika dari argumentasi yang disistemasi (Haryatmoko, 2016:24).

Kedua, praktik diskursif. Dimensi ini sudah masuk dalam tataran interpretasi dan intertekstualitas dalam pembuatan teks telah mendapatkan perhatian yang lebih (N. Fairclough, 1995:75). Dimensi ini berfungsi melihat kekuatan apa yang ada dibalik produksi teks, dan untuk kepentingan apa teks tersebut dimunculkan. Hal ini memiliki potensi juga untuk melihat sejauh mana teks diartikulasikan dengan teks-teks sebelumnya yang mendorong kemunculan dari teks ini. Artinya, dimensi kedua ini merupakan penyambung antara dimensi teks dan dimensi praksis sosial.

Ketiga, praksis sosial yang berkontribusi menentukan aktivitas, situasi, serta struktur sosial apa yang ada dalam masyarakat ketika produksi teks ini dilakukan.